

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN TENTANG PENYELEWENGAN KAS DESA DAN PENGUNAAN UANG KOMPENSASI PDAM OLEH KEPALA DESA**

**A. Didalam Bab ini akan dibahas mengenai Kasus Posisi Penyelewengan Kas  
Desa dan Penggunaan uang kompensasi PDAM yang dilakukan oleh Kepala  
Desa untuk menunjang objek Penelitian lapangan**

#### **1. Identitas Terdakwa :**

- a. Nama : Drs. Eman Suherman Bin Wisastra Tarsa
- Tempat lahir : Kuningan
- Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/03 Juli 1962
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dusun Tiga RT. 14/03 Desa Manis Kidul,  
Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Manis Kidul

#### **2. Kronologi Kasus 1 :**

Kepala Desa Manis Kidul yaitu Drs. Eman Suherman bin Wisastra Tarsa dalam periode 2007 sampai tahun 2011 yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa menggunakan surplus dari anggaran desa yang diperoleh untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa pada tahun anggaran 2007 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran pendapatan Desa sebesar Rp. 30.478.985,- kemudian terdakwa menggunakan uang Kas Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 21.630.000,-

Pada tahun anggaran 2008 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran Pendapatan Desa sebesar Rp.79.615.867,- kemudian terdakwa menggunakan uang Kas Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.9.600.000,-

Pada tahun anggaran 2009 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran pendapatan desa sebesar Rp.105.489.862,- kemudian terdakwa menggunakan uang Kas Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.34.800.000,-

Pada tahun anggaran 2010 Desa Manis Kidul masih mempunyai kas desa dari sisa lebih anggaran pendapatan desa sebesar Rp.67.518.951,- kemudian terdakwa menggunakan uang Kas Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.25.255.000,-

Dan pada bulan Juli tahun 2010, terdakwa Drs. Eman Suherman menerima uang Hibah sebesar Rp.25.000.000,- untuk perluasan area pemakaman Desa Manis Kidul oleh H. Asep Saputra, namun uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan dan dimasukkan dalam Kas Desa namun oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya.

Pada tahun anggaran 2011 Desa Manis Kidul masih mempunyai kas desa dari sisa lebih anggaran pendapatan Desa sebesar Rp.298.586.057,-

kemudian terdakwa menggunakan uang Kas Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.75.877.500,-

Pada tanggal 31 Desember 2011 terdakwa Drs. Eman Suherman menggunakan uang kas desa manis kidul dari kompensasi pemanfaatan sumber air cibulan oleh PDAM Kabupaten Kuningan sebesar Rp.11.500.000,- uang tersebut seharusnya dimasukkan dalam kas desa namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Sehingga pada kurun waktu 2007 hingga tahun 2011 ini Desa Manis Kidul mengalami kerugian sebesar Rp. 203.662.500.,

### **3. Tuntutan Jaksa**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidngan secara berurut-turut berupa keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, dan isi dari tuntutan Jaksa terhadap terdakwa Drs. Eman Suherman sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa Drs. Eman Suherman Bin Wisastra Tarsa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Nomor : PDS-01/KNING/09/2013 tanggal 06 Januari 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Eman Suherman bin Wisastra Tarsa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Eman Suherman bin Wisastra Tarsa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Korupsi secara Berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Eman Suherman bin Wisastra Tarsa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar terdakwa Drs. Eman Suherman bin Wisastra Tarsa membayar uang pengganti senilai Rp. 70.428.500,- (tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) subsidair 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan penjara;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 5 (lima) buah buku kas umum Desa Maniskidul kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
- b. 5 (lima) buah laporan realisasi APBDes Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 929/SP2D-LS/1.19.02/2009 tanggal 07 Mei 2009 keperluan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.43.450.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. 5 (lima) buah Peraturan Desa Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2007,2008,2009,2010 dan 2011;
- e. 1 (satu) bundle foto copy kwitansi pengeluaran uang;
- f. 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes BRI Cilimus Nomor Rekening 4270102000539 dan 427001021001535 atas nama Tatang Saputra;
- g. 15 (lima belas) buah buku kas pembantu Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;

- h. 1 (satu) bundle kwitansi penerimaan lainnya Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011;
- i. 5 (lima) bundle Berita Acara Persetujuan APBDes Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011;

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;**

- 7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**4. Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Kota Bandung Nomor : 7/TIPIKOR/2014/PT.BDG.**

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 7/TIPIKOR/2014/PT.BDG , yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Drs. Eman Suherman bin Wisastra Tarsa,

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. atas nama terdakwa Drs. Eman Suherman bin Wisastra Tarsa yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai pertimbangan hukum, besarnya uang pengganti, dan lamanya pidana

penjara dan pidana denda yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Eman Suherman bin Wisastra Tarsa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Eman Suherman bin Wisastra Tarsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Eman Suherman bin Wisastra Tarsa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 70.428.500,- (tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) buah buku kas umum Desa Maniskidul kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
  - b. 5 (lima) buah laporan realisasi APBDes Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 929/SP2D-LS/1.19.02/2009 tanggal 07 Mei 2009 keperluan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.43.450.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. 5 (lima) buah Peraturan Desa Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2007,2008,2009,2010 dan 2011;
  - e. 1 (satu) bundle foto copy kwitansi pengeluaran uang;



- f. 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes BRI Cilimus Nomor Rekening 4270102000539 dan 427001021001535 atas nama Tatang Saputra;
- g. 15 (lima belas) buah buku kas pembantu Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
- h. 1 (satu) bundle kwitansi penerimaan lainnya Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011;
- i. 5 (lima) bundle Berita Acara Persetujuan APBDes Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011;

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;**

- 9. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin tanggal 14 April 2014 oleh kami Syamsul Ali, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, F. Willem Saija, S.H.,M.H. Hakim Tinggi

pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Irwan Rambe, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nurdiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

## **B. Kasus serupa yang dilakukan oleh Kepala Desa**

### **1. Identitas Terdakwa**

Nama	: Widodo Bin Yoso Sumarto (alm)
Tempat lahir	: Solo
Umur/Tanggal lahir	: 55 Tahun/5 Mei 1960
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Bangunsari RT.03 RW.01 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Desa Bangunsari

## **2. Kronologi Kasus 2 :**

- Bahwa Widodo selaku Kades Sukorejo disangka melakukan korupsi berupa penyelewengan alokasi dana desa (ADD) secara berlanjut sejak awal hingga akhir tahun 2011 yang berjumlah sekitar Rp 2 jt-an.
- Bahwa Kades Sukorejo ini juga menyewakan tanah bendo milik desa kepada orang lain tanpa persetujuan BPD padahal seharusnya dilakukan melalui mekanisme lelang. Hasil dari penyewaan tanah ini dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Pada tahun 2011 tanah tersebut menghasilkan Rp 50 jt-an yang tidak jelas pertanggungjawabannya dan 2012 sebesar Rp 12 jt.
- Bahwa perbuatan Kades ini merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan peraturan lainnya.

## **3. Tuntutan Jaksa :**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif-subsidiaritas, sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA: Didakwa melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif-subsidiaritas, oleh karenanya Majelis dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Setelah mempelajari keseluruhan surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu. Apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua. Sebaliknya, dalam hal dakwaan Kesatu terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar, sebaliknya dalam hal dakwaan Kesatu Primair terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- dan
5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana

didakwakan padanya dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar, di mana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan dengan sengaja oleh Terdakwa. Perbuatan

Terdakwa menunjukkan adanya suatu kehendak dari Terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan Terdakwa pasti

mengetahui maksud dan tujuan perbuatannya tersebut untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Subsidiar, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya, apa yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya (pledooi) dan jawaban (duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai Terdakwa tidak terbukti bersalah, haruslah dikesampingkan dan tidak perlu ditanggapi lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa Dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 12 (dua belas) barang bukti, maka Majelis akan menentukan sebagaimana Tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**4. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : **12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg**,  
yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Widodo Bin  
Yoso Sumarto (alm),

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO Bin YOSO SUMARTO (alm) tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa WIDODO Bin YOSO SUMARTO (alm) dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WIDODO Bin YOSO SUMARTO (alm) tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIDODO Bin YOSO SUMARTO (alm) tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa WIDODO Bin YOSO SUMARTO (alm) tersebut berupa membayar uang pengganti

kepada Negara sebesar Rp.83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2011 Desa Bangunsari;
  - 2) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2011 Desa Bangunsari;
  - 3) Buku Kas Umum Model C.2 Desa Bangunsari Kec. Patebon Kab. Kendal;
  - 4) 1 (satu) bendel kwitansi data pendukung kas umum model C.2 bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Juli, Agustus, Oktober, Nopember, Desember tahun 2011;

- 5) 1 (satu) bendel kwitansi data pendukung buku kas umum model C.2 bulan Pebruari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Nopember tahun 2012;
- 6) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2012 Desa Bangunsari sebesar Rp.17.838.353,-;
- 7) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2012 Desa Bangunsari sebesar Rp.11.950.206,-;
- 8) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2012 Desa Bangunsari sebesar Rp.44.682.838,-;
- 9) Buku Tabungan BPD Jateng Cabang Kendal an. Desa Bangunsari, alamat Ds. Bangunsari Patebon Kendal No. Rekening 3-018-12655-8;
- 10) Buku Tabungan BPR BKK BOJA an. Bendahara ADD Bangunsari Kartimah alamat Bangunsari 03/01 No. Rekening 33.2414.5000660.0002;
- 11) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pembelian tahunan sawah bondo desa Desa Bangunsari Kec.Patebon yang terletak di Kelurahan Langenharjo oleh sdr. Sukino;
- 12) 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No.Kode Lokasi Desa  
22.11.04.50.51.00.17 Desa Bangunsari Kec.Patebon Kab.Kendal;

**Dikembalikan kepada Kantor Desa Bangunsari Kec.Patebon Kab. Kendal;**

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, oleh kami **ANTONIUS WIDIJANTONO, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SULISTIYONO, SH** dan **ROBERT PASARIBU, SH, MH**, Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **HARTATI, SH**, selaku Panitera Pengganti, **AVIYUANTO, SH** selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

### **C. Hasil Penelitian yang dilakukan di Kantor BPD Desa Maniskidul Kabupaten Kuningan dan Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor BPD Desa Manis Kidul Kabupaten Kuningan dan Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Toto Hartono selaku Kaur Umum di Kantor BPD Desa Manis Kidul dan juga dengan Bapak Zainnur, S.H selaku Kasi Pidsus di Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan yang mana peneliti menanyakan perihal sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan penulisan hukum ini. Wawancara yang dilakukan di Kantor BPD Desa Manis Kidul antara lain menanyakan perihal

Fungsi, Tugas, Wewenang dari BPD dan juga Proses Uang dari Negara masuk ke Desa.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, yaitu :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 35 PP No 72 Tahun 2005, dijelaskan BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.

Bagaimana Alur atau Proses uang dari Negara masuk ke Desa? Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Toto Hartono menjelaskan bahwa proses uang yang masuk dari Negara ke Desa itu di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yaitu Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatur kembali Ketentuan tentang Dana Desa untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Dana Desa, pemerintah melakukan pengaturan kembali tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 28 Desember 2015.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota secara berkeadilan, yang didasarkan pada dua jenis alokasi. Pertama, alokasi dasar, sebesar 90 persen. Kedua, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, yaitu sebesar 10 persen.

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dilakukan secara bertahap, penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan pada Bulan April, sebesar 40 persen. Tahap II dilakukan pada Bulan Agustus, juga sebesar 40 persen. Untuk tahap III dilakukan pada Bulan Oktober, sebesar 20 persen. Paling lambat dilakukan minggu kedua bulan

tersebut, dan disalurkan ke Desa melalui RKUD ke Rekening Kas desa paling lambat 7 hari setelahnya.

Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatur kembali Ketentuan tentang Dana Desa untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Dana Desa, pemerintah melakukan pengaturan kembali tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 28 Desember 2015.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota secara berkeadilan, yang didasarkan pada dua jenis alokasi. Pertama, alokasi dasar, sebesar 90 persen. Kedua, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, yaitu sebesar 10 persen.

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dilakukan secara bertahap, penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan pada Bulan April, sebesar 40 persen. Tahap II dilakukan pada Bulan Agustus, juga sebesar 40 persen. Untuk tahap III dilakukan pada Bulan Oktober, sebesar 20 persen. Paling lambat dilakukan minggu kedua bulan



tersebut, dan disalurkan ke Desa melalui RKUD ke Rekening Kas desa paling lambat 7 hari setelahnya.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Peran BPD dalam melakukan Pengawasan terhadap Kepala Desa di Desa Manis Kidul adalah sebagai berikut, Pemerintahan Desa secara yuridis

terdiri atas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat Kepala Desa bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi,

BPD bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota. Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *check and balances* dalam pembangunan desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Kepala Desa adalah BPD hal tersebut diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 huruf (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Maniskidul melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan Kepala Desa bersama BPD menyusun arah dan kebijakan umum seperti membahas Alokasi Dana Desa (ADD), menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan menyusun program kerja Desa.

Wawancara yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan antara lain membahas mengenai prosedur yang dilakukan dalam hal penyidikan terhadap kasus korupsi, perbedaan prosedur penyidikan di Kepolisian dengan Kejaksaan, dasar hukum yang digunakan, pertimbangan hakim dan lain sebagainya.

Prosedur yang dilakukan dalam hal penyidikan terhadap kasus korupsi yaitu Membuat laporan terjadinya Tindak Pidana, setelah sebelumnya

melakukan proses penyelidikan dan dua alat bukti sudah terpenuhi, selanjutnya administrasi penyidikan dibuat yaitu berupa surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan kelengkapan administrasi lainnya;

- Pemanggilan saksi;
- Pemanggilan tersangka;
- Pemanggilan ahli;
- Pemeriksaan saksi/ahli/tersangka;
- Penyitaan;
- Penggeledahan;
- Penangkapan – Perintah dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP)
- Penahanan;
- Penyelesaian Berkas Perkara.

Perbedaan prosedur yang dilakukan penyidik Kepolisian dengan Kejaksaan, Pada dasarnya SOP Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Kejaksaan adalah sama karena berpedoman kepada KUHAP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang membedakan adalah dasar hukum pemberian kewenangan tersebut. Jika pada Kejaksaan, dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 30 ayat (1) Undang-undang

Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan pada Kepolisian yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar Hukum yang digunakan dalam kasus Penyelewengan Kas Desa oleh Kepala Desa yaitu Pada dasarnya semua penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi berpedoman pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk Kepala Desa dengan klasifikasi Tuntutan Primair Pasal 2, dan Subsidiar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Yang dimaksud secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana. Sedangkan secara subyektif meliputi pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. Pertimbangan yang meringankan misalnya terdakwa mengikuti proses hukum dengan baik, sopan dipersidangan, dan belum pernah dihukum. Pertimbangan yang memberatkan misalnya terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa untuk melakukan kejahatan.

Faktor yang menyebabkan Kepala Desa tersebut melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu karena lemahnya Pengawasan, secara umum pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu Pengawasan Internal (Pengawasan fungsional dan Pengawasan langsung oleh pimpinan) dan Pengawasan yang bersifat Eksternal (Pengawasan dari Legislatif dan masyarakat) dan juga dari segi Hukum, faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum, dan juga adanya penyalahgunaan wewenang terdakwa sebagai Kepala Desa dengan tidak menyelenggarakan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan anggaran yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, sudah menjadi hukum wajib masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Setidaknya ada empat alasan mengapa masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam memerangi korupsi. Pertama, dengan melihat akar korupsi. Kedua, dampak korupsi bagi masyarakat. Ketiga, manfaat dari pemberantasan korupsi. Keempat, lemahnya aparat pemerintah dan penegak hukum dalam menangani korupsi.

Upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum terutama Kejaksaan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi antara lain seperti :

- Melakukan Upaya Pencegahan
  - a. Dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di masing-masing wilayah

b. Melakukan sosialisasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi-instansi terkait.

- Upaya Penindakan

Melakukan penindakan terhadap kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan dengan melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan.

- Upaya Edukasi Masyarakat

a. Melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

b. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan Negara.